

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

3.1.1 Sejarah Berdirinya Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan Prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD lama Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Berkat perjuangan unsur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu H. Suljana WH beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. bersama tokoh - tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhokseumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai *steakholder* di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta komponen-komponen lainnya guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri.

Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain:

- a. Kecamatan Tawang
- b. Kecamatan Cihideung
- c. Kecamatan Cipedes
- d. Kecamatan Indihiang
- e. Kecamatan Kawalu
- f. Kecamatan Cibereum
- g. Kecamatan Mangkubumi
- h. Kecamatan Tamansari

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disyahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Bp. Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif.

3.1.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya 2013 - 2017

1. Visi

Berlandaskan iman dan taqwa, mewujudkan kemandirian ekonomi, yang berdaya saing menuju masyarakat madani.

2. Misi

Misi 1 :

Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial masyarakat.

Misi 2 :

Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Misi 3 :

Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal.

Fokus Pembangunan Tahun 2013-2015 :

Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah.

Fokus Pembangunan Tahun 2016-2017 :

Mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.

3.1.3 Sejarah Singkat Dispenda Kota Tasikmalaya

Sejalan dengan pembentukannya Kota Administratif Tasikmalaya tanggal 3 November 1976 yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cihideung, Cipedes dan Tawang, dalam melaksanakan pemungutan pendapatan di Wilayah Kota Administratif dibentuk Cabang Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya, dengan dasar pada keputuasn Bupati No. SK.B.I/Peg.I/136-Sek/Str-Org/Paj/72, tentang pembentukan Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 1973, No.78/A-V/18/Perund/SK/1973.

Kewenangan pemungutan antara lain Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Retribusi Daerah meliputi Angkutan Sampah,

Pemakaman, Parkir Kendaraaan Bermotor, Sewa Tanah, Penyedotan Kakus, Sempadan (IMB), IMB Pemutihan, Advis Planning, Izin Gangguan dan Sumbangan Pihak III dari SITU.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemertintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi Daerah, yang secara efektif di mulai pada 1 Januari 2001, dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Pengimplementasian UU nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 2001 Maka Pemerintah Daerah membentuk Kantor Pendapatan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Keputusan Pj.Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2001.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 terjadi perubahan status Kantor Pendapatan menjadi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

Dinas Pendapatan secara definitif tanggal 27 Februari 2004, setelah dilantiknya kepala Dinas (Eselon II) beserta para eselon III (Kabag TU/Kabid) dan para eselon IV (Kasi/Kasubag) dengan struktur organisasi dan jumlah karyawan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 24 Tahun 2004, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas

Pendapatan Tasikmalaya, serta Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Kabid Perencanaan dan Penyuluhan
3. Kabid Pajak dan Retribusi Daerah
4. Kabid Pendapatan Lain-lain
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam kegiatan operasional satuan unit kerja tersebut di atas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak/Retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak /Wajib Retribusi "*door to door*".

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tasikmalaya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989, perlu disusun sistem dan prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah

ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan prosedur perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara *door to door* menjadi *self assesment*, yaitu wajib pajak/retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

3.1.4 Visi dan Misi Dispenda Kota Tasikmalaya

1. Visi

“Akselerator yang Handal di Bidang Pendapatan Daerah.”

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya adalah :

- a. Meningkatkan sumber pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3.1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dispenda Kota Tasikmalaya

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Dinas Kota Tasikmalaya serta Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2004, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya adalah :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan daerah dibidang pendapatan.

2. Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan RAPBD di bidang pendapatan daerah.
- c. Perencanaan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penggalian pendapatan.
- d. Pengkoordinasian tata kerja dan tata hubungan kerja di bidang pendapatan daerah.
- e. Pemberian rekomendasi dan perijinan dibidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan walikota sesuai dengan bidangnya.

3. Kewenangan

Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah pada bidang Keuangan Daerah adalah :

- a. Pelaksanaan Pengkoordinasian Pendapatan Daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis Operasional bidang Pendapatan Daerah; Penetapan Pajak dan Retribusi;
- c. Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi;
- d. Penelitian Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
- e. Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan Daerah.

3.1.6 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Kota Tasikmalaya

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003, bahwa Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha yang membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan dan Penyuluhan yang membawahi
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
- d. Bidang Pajak dan Restribusi yang membawahi
 1. Seksi Pendaftaran, Penataan dan Penetapan
 2. Seksi Pembukuan dan Penagihan Bidang Paret
- e. Bidang Pendataan Lain-lain yang membawahi
 1. Seksi Perimbangan Pendapatan

2. Seksi Pembukuan dan Penagihan Bidang Pendal

f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tata Kerja

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2004 bahwa Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, adalah :

- a. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pendapatan merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- b. Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksanaan Pemerintah Daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha menurut bidang tugas masing-masing;
- c. Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- d. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan simplikasi;
- e. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya.

3.2 Metode Penelitian

Dalam menjalankan suatu penelitian, untuk mencapai suatu tujuan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey (Mohammad Nazir, 2005: 56). Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Mohammad Nazir, 2005:54). Dan penelitian ini yang dilakukan dengan cara mengungkap peristiwa atau data-data yang telah lalu. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dengan melalui metode ini penulis memusatkan gambaran pemecahan yang sedang berlangsung.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Definisi variable menurut Sugiyono (2011: 2) adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Sesuai dengan penelitian yang penulis pilih yaitu “**Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**”, maka terdapat tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2011:4).

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah sebagai variabel X_1 dan Retribusi Daerah sebagai variabel X_2 .

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2011:4)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan definisi konseptual kedua variabel tersebut diatas, dapat ditetapkan indikator kedua variabel dan skala pengukuran sebagaimana diperlihatkan melalui tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak Daerah (X_1)	Iuran wajib yang dilakukan oleh orang/badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - Bea Perolehan 	Rupiah	Rasio

		Hak atas Tanah dan Bangunan		
Retribusi daerah (X_2)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk kepentingan orang/badan.	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Perizinan Tertentu 	Rupiah	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Abdul Halim, 2002 : 64)	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan pajak daerah - Retribusi daerah - Bagian laba usaha daerah - Lain-lain PAD yang sah. 	Rupiah	Rasio

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:223) Yaitu data yang diperoleh secara peninjauan langsung terhadap suatu objek penelitian dan hasil wawancara dengan pihak Badan, Dinas, dan Kantor terkait.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:223) Yaitu data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data

yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang ada dan jurnal-jurnal yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Pada penelitian ini yang menjadi populasi sasarannya yaitu Pemerintahan Kota Tasikmalaya dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan ruang lingkup penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya selama 10 tahun terakhir, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD Kota Tasikmalaya selama 10 tahun untuk periode 2007-2016.

3.2.2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data berupa:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian.

Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan pihak yang memberikan informasi. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta penjelasannya secara langsung.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan mengamati formulir serta laporan yang ada di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.

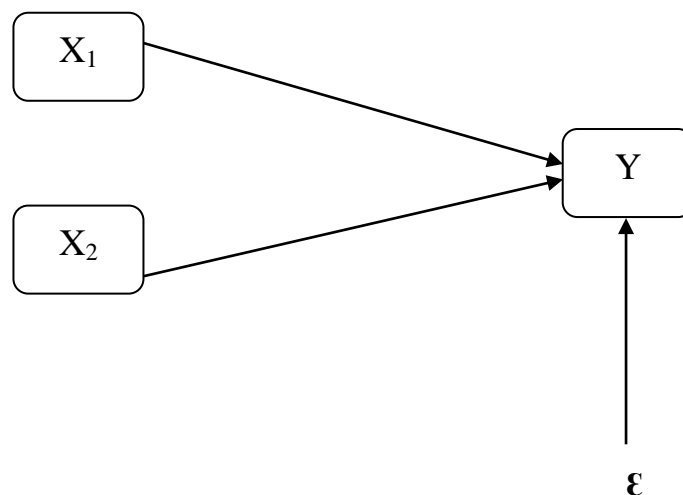
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber bacaan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai pembanding yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang logis dari hasil penelitian pada dinas yang bersangkutan.

3.3 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari pertama variabel independen (variabel bebas), yang menjadi variabel independennya adalah pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2). Yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah

pendapatan asli daerah (Y). Paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan:

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

Y = Pendapatan Asli Daerah

ϵ = Faktor lain yang tidak diteliti penulis

3.4 Teknik Analisis Data

Di dalam melakukan uji ini penulis menggunakan *software* SPSS 17 dengan metode statistik yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah salah satu asumsi untuk menguji apakah data variabel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk mengujinya dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi statistik yang dihasilkan dari perhitungan. Jika signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, bila tidak sebaliknya.

Jika data yang didapatkan memiliki distribusi normal maka dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Dengan kata lain, uji normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoritik tertentu. Dalam kasus ini, distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan meregresi model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *tolerance value (TV)* dan *variance tolerance factor (VIF)*. Jika nilai TV lebih besar dari 0,01 ($TV > 0,01$) dan VIF lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) maka tidak terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya (Ghozali, 2006:94).

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson (uji DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut:

- a. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $4-dL$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- b. Jika nilai DW terletak antara dU dan $4-dU$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c. Jika nilai DW terletak antara dL dan dU atau diantara $4-dL$ dan $4-dU$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini, diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2006:105).

3.4.2 Uji Regresi Berganda

Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dihitung dengan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pendapatan asli daerah pada periode tertentu.

b1 = koefisien regresi pajak daerah.

b2 = koefisien regresi retibusi daerah.

X1 = penerimaan pajak daerah.

X2 = penerimaan retibusi daerah.

a = konstanta.

e = *error term* (faktor pengganggu perubahan PAD).

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares/OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear unbiased estimator/BLUE*). Kondisi ini akan terjadi jika memenuhi beberapa asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik, sebagai berikut:

1. Nonmultikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna.
2. Homoskedastisitas. Artinya, varians semua variabel adalah konstan.
3. Nonautokorelasi. Artinya, tidak terdapat pengaruh dari variabel dalam model melalui tenggang waktu (*time lag*). Misalnya, nilai suatu variabel saat ini akan berpengaruh terhadap nilai variabel lain pada masa yang akan datang. Menurut model klasik ini tidak mungkin terjadi.
4. Nilai rata-rata kesalahan (*error*) populasi pada model stokastiknya sama dengan nol.
5. Variabel independen adalah nonstokastik (nilainya konstan pada setiap kali percobaan yang dilakukan secara berulang).
6. Distribusi kesalahan (*error*) adalah normal.

3.4.3 Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dalam analisis regresi, analisis korelasi digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk menganalisis seberapa besar keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Zero-Order Correlations*.

Hasil perhitungan koefisien korelasi dapat bernilai positif atau negatif. Apabila nilai koefisien korelasi positif, berarti kedua variabel saling

berhubungan. Sedangkan apabila nilai koefisien korelasi negatif, berarti kedua variabel tersebut saling berhubungan terbalik. Di bawah ini interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Keeratan Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2005:183)

3.4.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji signifikansi parameter individual (uji parsial t), signifikansi simultan (uji F), uji determinasi, dan analisis regresi berganda.

1. Uji Parsial (uji – t)

Menurut Ghozali (2006: 97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria pengujian t adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Simultan (uji – F)

Menurut Ghozali (2006: 101) uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama–sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Tingkat pengujian F adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi

Nilai korelasi r hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y), digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.